



**KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA MOJOGEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA**



KEPALA DESA MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MOJOGEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOGEDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224)
 5. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Mojogedang (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9);
 6. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG

dan

KEPALA DESA MOJOGEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojogedang
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan Daerah mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-desanya se Kecamatan Mojogedang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se Kecamatan Mojogedang;
11. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
13. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

15. Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama-LKD adalah BUMDesa yang dibentuk melalui kerjasama antar Desa untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah kerjasama antar Desa dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa Bersama-LKD.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Desa;
- b. pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesa Bersama-LKD;
- c. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa Bersama-LKD; dan
- d. pembentukan unit usaha BUMDesa Bersama-LKD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa disepakati melalui musyawarah antar Desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA DESA

Pasal 5

Kerjasama antar Desa diselenggarakan dengan prinsip :

- a. saling menghormati;
- b. saling menguntungkan;
- c. saling menjaga; dan
- d. mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV
DELEGASI DESA

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antar Desa yang dihadiri oleh delegasi Desa.

Pasal 7

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Ketua BPD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang wakil tokoh masyarakat sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif sebagai anggota; dan
 - f. 1 (satu) orang wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat sebagai anggota.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Desa dan diberikan Surat Tugas dari Kepala Desa.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Delegasi Desa diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerjasama antar Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kerjasama antar Desa dalam pengelola DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUMDesa Bersama-LKD.
- (2) Kewenangan delegasi Desa dalam upaya kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
 - a. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Desa;
 - b. pembentukan BUMDesa Bersama-LKD sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Desa;
 - c. kepengurusan BUMDesa Bersama-LKD;
 - d. mekanisme pengelolaan BUMDesa Bersama-LKD yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa Bersama-LKD dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar Desa; dan
 - f. mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar Desa dan pengambilan keputusan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar Desa dalam BUMDesa Bersama-LKD ditetapkan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023.
- (3) Penempatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojogedang

Ditetapkan di Mojogedang
Pada tanggal 10 Februari 2023
KEPALA DESA MOJOGEDANG,



Diundangkan di Mojogedang
Pada tanggal 10 Februari 2023
SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG,

TAUFIX AGUS RADITYO

LEMBARAN DESA MOJOGEDANG TAHUN 2023 NOMOR 4